



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMAR**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **419911**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 21.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/408 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI , Rp. 4.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/267 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 3.500.000.000
4. Tanah Seluas 2.688 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 5.000.000.000
5. Tanah Seluas 2.063 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/540 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 5.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 142.000.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI

Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.375.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 322.616.300

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 23.439.616.300

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 23.439.616.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.